

TUGAS JURNAL

INTERNAL CONTROL RISK AND AUDIT FEES:

EVIDENCE FROM CHINA



NAMA : RISKI SUPRANA

NPM : 1963001027

PROGRAM MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2020

TESIS

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)



Disusun oleh:

NAMA : RISKI SUPRANA

NOMOR POKOK : 1963001027

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA

KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara

PROGRAM MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA

2020

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Riski Suprana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1963001021
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Barang dan
Jasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT)


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Pertama



Dr. A. Rina Herawati, M.Si

Pembimbing Kedua



Dr. Asropi, M.Si

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNI STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RISKI SUPRANA
NOMOR POKOK : 1963001027
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEGIATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

Telah mempertahankan Tesis di hadapan panitia penguji tesis
Program Magister Ilmu Administrasi, Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 31 Oktober 2020
Pukul : 09.00

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si
Sekretaris : Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph.D
Anggota : Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU
Pembimbing 1 : Dr. A. Rina Herawati, M.Si
Pembimbing 2 : Dr. Asropi, M.Si



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RISKI SUPRANA

NPM : 1963001027

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang telah saya susun ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lemabaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Oktober 2020



Riski Suprana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi pada Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada untuk menyelesaikan tesis ini agar tidak menyimpang dari ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan untuk memenuhi tuntutan ilmiah. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun dari segi penyajian karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis dengan senang hati dan terbuka menerima kritik dan saran demi kesempurnaan proposal tesis ini.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis dengan tulus hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. A. Rina Herawati, M.Si dan Bapak Dr. Asropi, M.Si selaku dosen pembimbing tesis yang telah berjasa dengan waktu dan tenaganya untuk mengarahkan penulis selama proses penyusunan tesis ini, selain itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Ketua STIA LAN Jakarta beserta seluruh jajaran dosen dan staf Program Magister Ilmu Administrasi Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan atas bantuannya selama ini.
2. Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu yang telah mengasuh dengan penuh cinta dan pengorbanan, semoga Allah SWT melapangkan kuburnya mengampuni dosanya dan menerima seluruh amal ibadahnya.
3. Istri dan anakku, Dina Ayu Puspitasari dan Ramadanish Ridwan Mahaprana yang telah memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan penyusunan tesis ini. Setiap pengorbanan ada air mata yang menetes, bukan untuk melemahkan namun untuk saling menguatkan.

4. Bapak Kelik Budiana selaku Inspektur, Bapak Burhanuddin Guntur Selaku Auditor Utama, terima kasih atas waktu dan dukungannya serta motivasi yang diberikan.
5. Kakak Kandung saya, Adhitya Saputra yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Rekan Rekan Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang telah membantu serta memberikan motivasi dalam penulisan tesis ini.
7. Mona Forty Br Hutahaen, Eka Adhi Putra, Suci Rohdiyati dan Eka Voliana yang telah menjadi teman diskusi dalam penyelesaian kuliah dan penelitian ini.
8. Teman-teman satu kelas MKN 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang sangat besar selama masa studi. Semoga silaturahmi dan kebersamaan tidak akan pernah terputus.
9. Pihak-pihak lain yang membantu selama masa perkuliahan sampai akhirnya bisa menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat saya disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis sendiri maupun bagi instansi tempat penulis bekerja serta bagi perkembangan ilmu administrasi negara.

Jakarta, Oktober 2020

R.S.

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

RISKI SUPRANA, 1963001027
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
140 Halaman, 5 bab, xv, 18 tabel, 13 gambar, 4 lampiran
Daftar pustaka : 25 buku dan peraturan, 7 jurnal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah yang efektif dan efisien.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada kegiatan barang dan jasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, penulis berusaha mendeskripsikan melalui data informasi yang diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan langsung dan telaah dokumen. Key informant person merupakan pegawai BPPT dengan jumlah 6 orang.

Hasil penelitian tentang implementasi pengendalian intern pemerintah pada kegiatan pengadaan barang dan jasa ini telah dilakukan dengan berbagai upaya yakni : a) adanya Peraturan Kepala BPPT tentang implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, b) adanya kegiatan penandatanganan pakta integritas oleh pejabat pembuat komitmen, c) pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan pengadaan barang dan jasa, d) pemantauan secara berkelanjutan yang dilakukan secara rutin.

Hasil penelitian ini memberikan saran bahwa PPK dan ULP perlu melakukan identifikasi risiko dan Inspektorat perlu melakukan sosialisasi atas kebijakan pengendalian internal.

Kata kunci : Pengendalian intern, efektif dan efisien, APIP, BPPT.

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM MANAJEMEN EKONOMI PUBLIK

ABSTRACT

RISKI SUPRANA, 1963001027

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM PROCUREMENT IN
AGENCY ASSESMENT AND APLICATION TECHNOLOGY

140 page, 5 chapters, xv, 18 table, 13 picture, 4 attachment

References : 25 books and regulations, 7 journal

Government Regulation (PP) Number 60 of 2008 concerning the Internal Government Control System, has mandated that the effective realizatio of the role of APIP must at least provide adequate confidence in the obedience, efficiency and effectiveness of achieving the objectives of implementing the duties and function of government agencies. Therefore, it can be said that the internal control system plays a key role in realizing effective and efficient government financial accountability.

This study describes how the implementation of the government's internal control system on goods and services activities in the Agency for the Assessment and Application of Technology. This research was conducted using a qualitative method, the author tries to describe through the information data obtained by means of interviews, direct observation and document review. Key informant person is a BPPT employee with a total of 6 people.

The results of research on the implementation of government internal control in goods and services procurement activities have been carried out with various management efforts, namely: a) the existence of a Regulation of the Head of BPPT concerning the implementation of the government internal control system, b) the signing of the integrity pact by the commitment making official, c) the management of technology information in monitoring activities for the procurement of goods and services, d) fires on a regular basis.

The Result of this study sugest that PPK and ULP need to identify risks and Inspektorat needs to disseminate internal policies.

Keywords: Internal control, governance, Effective and Efficient APIP, BPPT



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar belakang.

Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma baru Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) semestinya sudah mengarah kepada peran konsultasi dan assurance. Demikian juga auditor internal pemerintah yang tidak lagi mencari kesalahan dan melakukan mata mata namun lebih dari itu yakni dapat berperan sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen. Wacana tentang perubahan ini sangat terus menerus di kalangan pengawasan internal. Kehadiran auditor internal di pemerintahan atau di kenal dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), bagi pemerintah menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu dan selayaknya ditempatkan sebagai strategic bussines partner bagi kebutuhan manajemen.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tuntutan peran Tuntutan peran APIP yang efektif, telah mengalami perubahan sejak hadirnya PP No. 60/2008 yang memperluas cakupan peran APIP menjadi pemberi keyakinan dan konsultasi. Perubahan peran APIP membuat fungsi APIP tidak hanya memberi keyakinan melainkan juga melakukan kegiatan konsultasi untuk membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang

dihadapi organisasi. Namun demikian, apabila metode, pendekatan dan fokus audit tidak dirubah, mengakibatkan peran pemberi keyakinan (*assurance*) dan konsultan (*consulting*) juga tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik SDM (Sumber Daya Manusia), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah yang efektif dan efisien. Kelemahan sistem keuangan pada instansi pemerintah selama ini terjadi karena lemahnya desain dan pelaksanaan sistem pengendalian Intern. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan *basic requirement* untuk mewujudkan *good public governance* (Mardiasmo, 2016). *Good governance* inilah yang menjadi tujuan akhir dari penerapan SPIP. Menurut Arie Soelendro (2000:13), dalam Arja Sadjiarto (2000) unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility dan accountability*. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat bahwa unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan Ikhtiar Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019 atas 85 LKKL dan LKBUN tahun 2018 jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP mencapai 94%, namun sampai saat ini BPK masih menemukan permasalahan

terkait kelemahan SPI yakni sebanyak 901 yang terdiri dari 395 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (44%), 307 permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (34%), dan 199 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern (22%), Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 2019 oleh BPK penganggaran belanja modal dan belanja barang yang dilakukan tidak tepat. Kondisi ini membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian intern di pemerintah masih belum berjalan secara optimal dan terdapat banyak hambatan dan kelemahan. Kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern (SPI) dapat saja mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan. Permasalahan yang sering muncul dalam pengadaan barang dan jasa adalah tidak sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), keterlambatan kedatangan barang dan jasa dari mitra, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, serta tidak sesuai spesifikasi barang yang diterima dengan kontrak yang diperjanjikan.

Harapan yang melambung tinggi tentang penguatan dan penajaman peran APIP tersebut, terganjal dengan beberapa kendala yang ada. Kondisi yang terjadi seperti minimnya kompetensi sumber daya auditor, independensi dan obyektivitas yang lemah, dukungan alokasi anggaran APIP yang sangat kecil, tidak terpenuhinya formasi auditor, serta standar audit, kode etik, dan *peer review* yang belum berjalan semestinya, menyebabkan kinerja instansi pengawasan pemerintah belum optimal. Peran Inspektorat dapat dimanfaatkan sebagai penambah nilai sebuah kegiatan dalam kegiatan operasional di Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi. Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai pengawas internal dalam pelaksanaan kegiatan di BPPT sebaiknya didukung dengan komposisi yang ideal supaya dapat melakukan proses pendampingan dengan maksimal. Berikut ini komposisi sumber daya manusia di Inspektorat BPPT, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi SDM Inspektorat 2020

No	Status	Jumlah (orang)
1	Inspektur	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3	Auditor Utama	2
4	Auditor Madya	1
5	Auditor Muda	9
6	Auditor Pertama	7
7	Auditor Penyelia	1
8	Fungsional Arsiparis	1
9	Fungsional Umum	6
TOTAL		29

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat 2020

Tabel 1.2
Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
S2	5
S1	22
D1 - D3	1
SLTA	1
TOTAL	29

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat 2020

Sesuai amanat PP No. 60 tahun 2008 dalam mewujudkan peran APIP yang efektif, maka unit APIP juga harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Namun faktanya, perubahan peran APIP belum optimal yang diperkuat juga dengan hasil pemetaan kapabilitas terkini oleh BPKP (Badan Pengawasan dan Pembangunan Pemerintah). Menurut Kuntadi (2019) Merujuk pada hasil penilaian kapabilitas APIP tahun 2019 terhadap 628 APIP nasional, tingkat kapabilitas level 1 sebanyak 51 APIP (8,12%), level 2 sebanyak 251 APIP atau sebesar 39,97% dan level 3 sebanyak 326 APIP atau sebesar 51,91%, dan APIP sudah berperan sebagai konsultan, sementara sisanya belum dilakukan penilaian.

Melalui Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 347 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi memiliki tujuan (1) tercapainya tujuan BPPT melalui kegiatan yang efisien, efektif dan akuntabel, (2) terciptanya keandalan pelaporan keuangan BPPT, (3) terjaganya keamanan aset negara yang berkesinambungan, dan (4) meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Peraturan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam setiap kegiatan di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi haruslah memiliki identifikasi dan analisa risiko guna dapat diketahuinya risiko – risiko yang timbul dari setiap kegiatan.

Dengan masih adanya kelemahan – kelemahan mengenai sistem pengendalian di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sistem pengendalian intern pada kegiatan pengadaan barang dan jasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai yang besar dan dengan jumlah yang banyak dapat menjadi awal timbulnya dari sebuah kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Daftar jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Kegiatan Barang dan Jasa BPPT

No	Tahun Kegiatan	Paket Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	2015	1.756 Paket	Rp. 407.931.000.000,00

No	Tahun Kegiatan	Paket Kegiatan	Pagu Anggaran
2.	2016	2.462 Paket	Rp. 429.930.000.000,00
3.	2017	2.513 Paket	Rp. 846.292.000.000,00
4.	2018	2.012 Paket	Rp. 565.827.000.000,00
5.	2019	1.830 Paket	Rp. 712.886.000.000,00

Sumber : Aplikasi SiRup LKPP Per 31 Mei 2020.

Berdasarkan data rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dimana tren dua tahun ini meningkat jumlah pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Implementasi pengendalian intern terutama dalam pengadaan barang/ jasa menjadi penting untuk dilakukan karena diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dalam upaya menjaga agar instansi pemerintah tetap berada dalam jalur menciptakan good governance dan pencapaian visi, misi dan tujuannya serta untuk meminimalisir terjadinya suatu kejadian yang berpotensi merugikan negara secara finansial maupun nonfinansial. Pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara memadai akan membantu mendorong kearah efektif dan efisien, mengurangi risiko kehilangan atau kerugian negara dan membantu meyakinkan keandalan laporan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, menjelaskan bagaimana pentingnya peran sistem

pengendalian intern atas pengadaan barang dan jasa tersebut dalam suatu instansi pemerintahan dengan ini penulis tertarik kedalam perumusan masalah yang lebih fokus yaitu dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilihat dari sisi lingkungan pengendalian.
2. Bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilihat dari sisi penilaian risiko.
3. Bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan dilihat dari sisi kegiatan pengendalian.
4. Bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan dilihat dari sisi informasi dan komunikasi.
5. Bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan dilihat dari sisi pemantauan.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memperoleh bukti empiris sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilihat dari sisi lingkungan pengendalian

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilihat dari sisi penilaian risiko.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan dilihat dari sisi kegiatan pengendalian.
4. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan dilihat dari sisi informasi dan komunikasi.
5. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan dilihat dari sisi pemantauan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dan praktis, diantaranya:

1. Manfaat akademik, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu administrasi khususnya pengembangan manajemen keuangan negara.
2. Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai pengendalian internal di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Secara umum penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada kegiatan pengadaan barang dan jasa belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Masih terdapat beberapa kelemahan pelaksanaan pengendalian internal khususnya pada unsur penilaian risiko. Penilaian risiko ini menjadi bagian awal dalam melakukan mitigasi risiko supaya tidak adanya risiko risiko yang timbul sehingga dapat meminimalisir dampak atas risiko pengadaan barang dan jasa. Penerapan unsur penialain resiko pengadaan barang dan jasa kedepannya bisa lebih baik dan dapat mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
2. Sebagai bentuk implementasi aktivitas pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah melakukan langkah langkah pengendalian internal sebagai bentuk lingkungan pengendalian dengan mengedepankan integritas dan nilai nilai etika, kegiatan pengendalian

pengadaan barang dan jasa, adanya koordinasi dan komunikasi atas setiap kegiatan dan hambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta adanya peran Inspektorat sebagai perwujudan pengendalian internal guna melakukan pemantauan secara terus menerus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) perlu melakukan identifikasi risiko dan analisa risiko sebagai bentuk mitigasi risiko atas risiko risiko yang muncul guna meminimalisir dampak atas akibat dari risiko pengadaan barang dan jasa. Hal ini sebagai pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) agar dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
2. Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai pengawas internal melakukan sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pejabat pembuat komitmen, mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya, evaluasi secara berkala atas efektifitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis.

3. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern dapat melakukan analisa dan identifikasi risiko – risiko secara menyeluruh agar setiap kegiatan di unit kerja atau satuan kerjanya dapat diketahui risikonya sejak awal atau tahap perencanaan.
4. Pimpinan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) dalam hal ini guna peningkatan kompetensi khususnya sistem pengendalian internal dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) khususnya dalam program pengadaan barang dan jasa.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi faktor-faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti – peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya khususnya dalam jumlah sample informant dan variable yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commission. 2013. Internal Control – Integratde Framework: Executive Summary. Coso Mei. 2013.
- Francis, J., Ke, B., 2003. Do Fees paid to auditors increase a company's likelihood of meeting analyst forecast? Working paper. University of Missouri and Pennsylvania State University.
- Halim, A dan Kusufi, S. (2012). Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Handoko, Hani, (1999), *Manajemen*, BFFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Hasibuan,(2001) *Motivasi dalam Organisasi*, (Bandung: Mandar Maju,)
- Jensen, Michael. (2001). Value Maximation, Staeholder Theory, and the Corporate Objective Function. *Europian Financial Management* 7: 297-317.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- Kuntadi, Cris. (2019) *Audit Internal Sektor Publik*. Cetakan 1. Penerbit Salemba. Jakarta.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Meleong, Lexy, (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya Bandung.
- Merriam, Sharan B. (2009). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco : John Wiley& Sons, Inc.
- Moh. Wahyudin Zarkasyi. (2008). *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur Ilmi dkk. (2017). Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjukan Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Vol 12 No 2 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Ruspina, Depi Oktia. (2013). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (studi empiris pada Pemerintahan Kota Padang). UNP. Padang
- Sadjiarto, Arja. (2000). "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, No 2, Nopember 2000.
- Sari, Diana (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian pada Pemerintahan Provinsi Barat dan Banten). Universitas Widyatma Bandung.
- Sarundajang, (2005), Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Kata Hasta Pustaka, Jakarta
- Schein, E. H. (2008). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Taruno, Singgih Aji, (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba: Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. Accounting Analysis Journal 2. UNNES Semarang.
- Terry, George R. (2012) *Dasar- Dasar Manajemen*, Alih bahasa: G.A. Ticoalu, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- W. Riawan Tjandra,(2013) Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta.
- Wiguna. Meilda dan Agri Putra. Adhitya. (2017). Analysis of Factor That Affect Good Government Governance Implementation (Empirical Study on Government of Indragiri Hilir Regency). Politeknik Caltex Riau.
- Yunus, Hadori. (2000). Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik. Jakarta

Zamzani, Faiz dan Arifin Faiz, Ihda. (2015). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Universitas Gadjah Mada.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A